

KONSTRUKSI IDEOLOGI MENGGUNAKAN FITUR GRAMATIKAL DALAM RUBRIK TAJUK HARIAN UMUM *HALUAN KEPRI*

Harry Andheska¹, Cut Purnama Sari², Ermayenti³
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)¹
STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang²
SMP Negeri 3 Koto XI Tarusan³
harryandheska@umrah.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini merupakan kajian wacana kritis dengan mengadaptasi model analisis Norman Fairclough yang difokuskan hanya pada tahapan deskripsi teks. Data yang dianalisis dalam artikel ini berasal dari teks pada kolom tajuk harian umum *Haluan Kepri* yang dibatasi hanya empat teks yang terbit pada edisi bulan November 2017. Pengumpulan dan penganalisisan data disesuaikan dengan prosedur pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berupa temuan-temuan konstruksi ideologi dari wacana yang dianalisis dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, konstruksi ideologi melalui nilai eksperiensial dilakukan dalam bentuk pendayagunaan (1) fitur pentransitifan, (2) fitur pemasifan, dan (3) fitur penegasifan. Kedua, konstruksi ideologi melalui nilai relasional dilakukan dalam bentuk pendayagunaan (1) fitur modus-modus kalimat (deklaratif dan interogatif), (2) fitur modalitas (intensional, epistemik, dan deontik), dan (3) fitur pronomina persona. Ketiga, konstruksi ideologi melalui nilai ekspresif dilakukan dalam bentuk pendayagunaan modalitas-modalitas ekspresif. Hal ini membuktikan bahwa pendayagunaan fitur-fitur gramatika secara realitas memang digunakan oleh para penghasil wacana untuk mengonstruksi sebuah ideologi. Konstruksi ideologi ini dilakukan melalui penggunaan kalimat-kalimat yang ditata sedemikian rupa untuk tujuan tertentu.

Kata Kunci: *konstruksi ideologi, kosakata, gramatikal*

A. PENDAHULUAN

Sejumlah hasil penelitian yang mengambil kajian wacana kritis sudah banyak dilakukan oleh para ahli, baik ahli yang berasal dari bidang ilmu linguistik, komunikasi, maupun bidang ilmu lainnya yang ada keterkaitannya dengan teori bahasa kritis. Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun banyak ahli yang tertarik untuk meneliti penggunaan bahasa dalam

wacana publik. Realita penggunaan bahasa yang menjadi konsumsi publik ini, secara teori kritis, memiliki ideologi-ideologi tertentu yang diperjuangkan oleh suatu komunitas. Selain itu, penggunaan bahasa dalam wacana publik ini secara tidak langsung mempunyai efek kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan karena bahasa yang digunakan dalam wacana tersebut diatur sedemikian rupa untuk kepentingan

kelompok atau para elite tertentu. Oleh karena itu, dalam sebuah wacana publik, dapat dipastikan adanya dikotomi antara pihak yang dimarginalkan dengan pihak tertentu yang diuntungkan.

Dalam kehidupan sehari-hari ini, masyarakat umum yang notabeneanya “awam” dalam kajian bahasa menganggap bahwa informasi yang disampaikan melalui penggunaan ruang publik sebagai sesuatu yang aktual dan faktual. Kebenaran informasi yang disampaikan melalui bahasa di suatu media massa dianggap sebagai hal yang benar tanpa dimaknai dengan kritis. Oleh karena itu, kajian wacana kritis ini bertujuan untuk menyadarkan publik dari tindakan pengaburan informasi, penyesatan informasi, bahkan dari tindakan pembodohan yang dilakukan secara terselubung oleh para penghasil wacana melalui teks-teks untuk kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, dalam memproduksi teks, pasti adanya unsur kesengajaan yang diatur sedemikian rupa untuk menyampaikan ideologi tertentu kepada publik. Para pembuat wacana memberdayakan fitur-fitur lingual untuk menata bahasa agar bisa diterima sebagai sebuah *common sense*. Pembaca tidak pernah mengetahui ideologi yang sedang diperjuangkan oleh pembuat wacana. Oleh karena itu, kajian wacana kritis ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam teks pada suatu wacana.

Hasil penelitian yang mengkaji tentang wacana kritis ini sudah dilakukan oleh beberapa ahli, di antaranya (Firman,

2015; Mujiyanto 2016) dalam bentuk disertasi yang tidak dipublikasikan. Hasil penelitian tersebut mengkaji tentang pendayagunaan fitur-fitur lingual dalam media massa dan konstruksi ideologi yang terjadi dalam suatu wacana publik. Objek yang menjadi kajian dari penelitian tersebut, yakni media massa dan wacana publik yang bersifat nasional. Selain itu, bentuk penelitian lain yang sudah dipublikasikan dilakukan oleh (Yuliarni, 2013; Nurhayati, 2014; Asmara, 2016). Ketiga ahli tersebut dalam tulisannya juga mengkaji isu-isu yang bersifat luas dalam media dengan skala nasional, seperti pro dan kontra RUU anti pornografi dan pornoaksi, representasi peristiwa dalam media *Suara Merdeka*, dan strategi kebahasaan Presiden Jokowi.

Kajian-kajian yang dilakukan dari penelitian sebelumnya di bidang wacana kritis lebih banyak mengkaji media massa yang sifatnya nasional dengan isu sentral yang sudah diketahui oleh publik secara luas. Secara realita, media massa dengan skala nasional sudah teruji kredibilitasnya dalam menggunakan bahasa untuk mempengaruhi publik. Selain itu, media massa nasional memuat isu-isu yang sifatnya luas dan holistik.

Kajian yang akan dibahas dalam tulisan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh pada peneliti sebelumnya. Kajiannya difokuskan pada media lokal yang berada di salah satu provinsi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengungkap secara teknis isu-isu lokal yang ditulis dengan penggunaan bahasa yang notabeneanya pasti dipengaruhi oleh kultur kebudayaan setempat. Oleh karena itu, kajian wacana kritis yang

dilakukan dalam tulisan ini tidak hanya mengungkap fakta tertulis secara kritis, tetapi juga melihat karaktersitik penggunaan bahasa dengan latar belakang penulis/pembuat wacana berbudaya Melayu

B. METODE PENELITIAN

Temuan data yang akan dibahas pada tulisan ini menggunakan prinsip pendekatan kualitatif dalam bentuk analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Analisis wacana menurut Norman Fairclough ini terbagi dalam tiga tahapan, yakni tahap deskripsi teks, tahap interpretasi, dan tahap eksplanasi. Pada tulisan ini, pembahasan hanya dilakukan pada tahapan deskripsi teks saja. Lebih lanjut Fairclough (1989:109) mengemukakan bahwa ada tiga fitur lingual yang dapat diperiksa pada tahap deskripsi ini, yakni (1) kosakata, (2) gramatika, dan (3) struktur teks. Pembahasan dalam tulisan ini hanya dispesifikan pada fitur gramatikal.

Sumber data utama berasal dari dokumen tertulis yang diambil langsung dari harian umum *Haluan Kepri* versi daring (<http://www.haluankepri.com>). Adapun bagian yang dikaji dalam tulisan ini difokuskan pada rubrik tajuk yang ditulis secara langsung oleh pemimpin redaksi Harian Umum *Haluan Kepri* sendiri. Rubrik ini terbit dari hari Senin—Jumat di setiap minggunya. Untuk keperluan penganalisisan data dalam tulisan ini, rubrik tajuk yang diambil sebagai kajian hanya dibatasi empat teks tajuk yang terbit pada edisi bulan November tahun 2017 saja, di antaranya (1) “Menciptakan Estetika Kota” terbit pada hari Rabu, 1 November 2017, (2) “Penggusuran

PKL” terbit pada hari Jumat, 3 November 2017, (3) “Mencari Solusi Genangan Air saat Hujan” terbit pada hari Rabu, 15 November 2017, dan (4) “Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan” terbit pada hari Selasa, 28 November 2017. Data yang akan dibahas pada tulisan ini adalah kalimat-kalimat yang dicurigai mengandung unsur ideologi dalam produksi kewacanaan pada rubrik tajuk harian umum *Haluan Kepri* tersebut. Prosedur pengumpulan data dilakukan sesuai dengan kaidah teknik penelitian *content analysis*. Sementara itu, analisis data juga mengikuti kaidah penelitian *content analysis* dalam paradigma kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Secara garis besar, pembahasan konstruksi ideologi menggunakan fitur gramatikal dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu (1) konstruksi ideologi melalui nilai-nilai eksperiensial, (2) konstruksi ideologi melalui nilai-nilai relasional, dan (3) konstruksi ideologi melalui nilai-nilai ekspresif. Untuk lebih jelasnya, ketiga bentuk nilai pembentuk ideologi tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Konstruksi Ideologi Melalui Nilai Eksperiensial dalam Rubrik Tajuk Harian Umum *Haluan Kepri*

Secara teoretis, pembentukan ideologi melalui nilai eksperiensial ini dibagi menjadi empat subbagian, yakni (1) melalui pendayagunaan fitur pentransitifan, (2) melalui pendayagunaan fitur penominalisasian, (3) melalui

pendayagunaan fitur pegasifan, dan (4) melalui fitur penegasifan. Akan tetapi, untuk kepentingan pembahasan dalam tulisan ini, penganalisisan dan pembahasan data hanya difokuskan pada tiga bagian saja. Hal ini disebabkan karena konstruksi ideologi melalui pendayagunaan fitur penominalisasian tidak ditemukan dalam data ini.

a. Pendayagunaan Fitur Pentransitifan

Terdapat tiga bentuk pentransitifan yang terjadi dalam kalimat, (1) proses material, (2) proses mental, dan (3) proses relasi (Butt *et all.*, 1995; Halliday, 2004; Santoso, 2012). Dari data yang dianalisis, hanya ditemukan dua dari tiga bentuk pentransitifan dalam kalimat tersebut, yakni proses material dan proses mental. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini hanya difokuskan pada dua proses tersebut. Fitur pentransitifan pertama yang ditemukan dalam data ini yaitu, berupa proses material. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut.

*Pembangunan fisik yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Batam, saat ini, telah **mengubah** wajah Batam.*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi proses pentransitifan pada kalimat dari teks yang disampaikan. Dalam kalimat tersebut, pembuat wacana ingin menonjolkan Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini berfungsi sebagai agentif, telah melakukan berbagai upaya untuk pembangunan Kota Batam. Hal tersebut

ditunjang dengan kehadiran frasa “wajah Batam” yang memang fungsinya sebagai objek dalam sebuah kalimat transitif. Telihat jelas bahwa agentif mengontrol fungsi objek dalam kalimat tersebut.

Secara realisasi, pemerintah Kota Batam, sebenarnya, belum terlalu maksimal dalam melakukan pembangunan. Akan tetapi, karena proses material yang terjadi dalam kalimat ini, Pemerintah Kota Batam seolah-olah memang secara nyata telah melakukan suatu tindakan. Ideologi yang sedang diperjuangkan dalam proses ini, yakni ideologi **keberhasilan**. Pembuat wacana terlihat meyakinkan kepada publik bahwa Pemerintah Kota Batam memang menjalankan peran ke pemerintahannya dengan baik. Selain kutipan tersebut, bentuk lain dari proses material yang terjadi dalam wacana yang dianalisis tergambar pada kutipan berikut.

*Pedagang kaki lima (PKL) yang berada disekitar row jalan simpang lampu merah, Kampung Becek, Batuaji, Batam **menghadang** Satpol PP.*

Pada kutipan tersebut, pentransitifan terlihat pada penggunaan bentuk verba “menghadang” yang berfungsi sebagai predikator. PKL ditempatkan sebagai agen karena berada pada fungsi subjek, sementara Satpol PP ditempatkan pada posisi objek yang perannya sebagai sasaran. Melalui proses material ini, pembuat wacana terlihat menonjolkan sifat PKL yang memang selalu melawan ketika dilakukan pengrusakan. Sementara, Satpol PP terlihat sebagai korban

perlawanan yang dilakukan oleh PKL. Oleh karena itu, ideologi yang secara sengaja diperjuangkan, yakni ideologi **pemberontakan** yang selalu identik dalam diri pada para PKL. Pembuat wacana mencoba untuk mendiskreditkan PKL dengan kata “menghadang” tersebut. Lain halnya dengan Saptol PP, dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak pada posisi yang benar, selalu mendapatkan perlawanan dari PKL. Selain proses material, pada fitur pentransitifan ini juga terdapat konstruksi ideologi melalui proses konstruksi mental. Perhatikan kutipan berikut.

*Hal ini dibuktikan, hampir di setiap persimpangan jalan, papan reklame yang berjejeran **memenuhi** sisi jalan. Tidak jarang dijumpai, papan reklame tersebut sudah saling berdempetan*

Dalam kutipan tersebut, tergambar proses mental yang terjadi melalui pentransitifan yang ditunjukkan oleh verba “memenuhi”. Papan reklame yang berada pada posisi subjek berperan sebagai agen, sedangkan yang berfungsi sebagai objek ditempati oleh frasa sisi jalan. Pembuat wacana mencoba untuk menggambarkan proses mental yang terjadi pada papan reklame. Pembaca diajak untuk membayangkan bentuk papan reklame yang berjejeran penuh di pinggir jalan itu. Pihak yang didiskreditkan dalam hal ini, yaitu para pemilik papan reklame tersebut. Secara tidak langsung, pembuat wacana memperlihatkan ketidakteraturan para pemilik dalam

menempatkan papan reklame miliknya. Mereka seolah-olah tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah suatu kesalahan karena merusak keindahan kota. Oleh sebab itu, ideologi yang sedang dibangun oleh pembuat wacana, yakni ideologi **ketidakteraturan**.

b. Pendayagunaan Fitur Pemasifan

Ada dua temuan dari teks yang dianalisis tentang pendayagunaan fitur kalimat pasif dalam mengonstruksi ideologi yang diperjuangkan oleh pembuat wacana. Sesuai dengan pendapat Fairclough (1989:142) bahwa proses tindakan ataupun perbuatan dapat saja direpresentasikan dalam bentuk kalimat aktif maupun pasif. Selain itu, menurut pandangan Fowler (1996) bahwa pemilihan kalimat pasif sebagai representasi suatu bahasa bertujuan untuk menghilangkan pelaku (agen). Konstruksi ideologi tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Batam tersebut patut **diapresiasi**. Soalnya, pasca normalisasi drainase, membebaskan bangunan di atas drainase, dan pelebaran drainase, titik genangan air sudah mulai berkurang.*

Dari kutipan tersebut, tergambar pendayagunaan fitur pemasifan yang ditandai dengan penggunaan verba “diapresiasi”. Kalimat tersebut dalam bentuk pasif, terjadi penghilangan peran. Agen menjadi samar-samar dan tidak jelas.

Pihak yang memberikan apresiasi tidak diketahui pelakunya. Tujuan ini dilakukan untuk menimbulkan kesan bahwa semua pihak tanpa terkecuali memberikan apresiasi yang positif terhadap kinerja Pemko Batam. Kata “diapresiasi” yang berasal dari opini penulis sendiri dimunculkan untuk mengonstruksi ideologi **keberpihakan**. Pada kutipan tersebut, terlihat pembuat wacana sangat pro kepada Pemerintah Kota Batam. Secara tidak langsung, kata “diapreasi” dinaturalisasikan kepada pembaca agar menyetujui bahwa yang dinyatakan oleh pembuat wacana adalah suatu hal yang benar dan harus disetujui. Di samping itu, pembuat wacana juga berusaha menampilkan sejumlah fakta-fakta untuk memperkuat argumentasinya. Selain bentuk pemasifan pada kutipan tersebut, berikut ini ada bentuk pasif yang tidak sama dengan kutipan sebelumnya. Pelaku tetap dihadirkan, tetapi posisinya diletakkan pada fungsi objek.

Sekarang, upaya untuk membuat kota ini makin sedap dipandang juga akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi proses pemasifan dalam kalimat dari teks yang disampaikan. Hal itu ditandai dengan penggunaan verba “dilakukan”. Kalimat ini secara teknis hampir sama maknanya apabila diubah ke dalam bentuk kalimat aktif. Akan tetapi, pembuat wacana memposisikan struktur kalimat ini dalam

bentuk pasif dengan maksud dan tujuan tertentu. Klausa “upaya untuk membuat kota ini makin sedap dipandang” dalam posisi aktif seharusnya berperan sebagai objek. Akan tetapi, dalam konteks ini, klausa tersebut berfungsi sebagai subjek dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensi dari klausa tersebut yang merupakan sasaran tindakan dari agentif yang sebenarnya (DPM-PTSP Kota Batam). Pembuat wacana sedang memperjuangkan ideologi **keikutsertaan** dan **keaktifan**. DPM-PTSP Kota Batam, dalam hal ini, merupakan pihak yang ikut andil terlibat dalam penataan Kota Batam. Di samping itu, melalui pemasifan ini DPM-PTSP Kota Batam juga direpresentasikan sedangkan menjalankan fungsinya sebagai suatu instansi pemerintahan.

c. Pendagunaan Fitur Penegatifan

Pendayagunaan fitur penegatifan yang dimaksud, yakni menggunakan pola kalimat negatif. Ada tiga temuan dari teks yang dianalisis tentang pendayagunaan fitur kalimat negatif dalam mengonstruksi ideologi yang diperjuangkan oleh pembuat wacana. Mengacu pada pendapat Fairclough (1989:125) bahwa proses negasi merupakan salah satu cara untuk membedakan benar atau tidaknya kasus yang disajikan dalam suatu realitas. Hal tersebut dapat diperhatikan pada kutipan berikut.

Pedagang tidak terima, kedai sebagai tempat jualan mereka digusur, Kamis (2/10)

Tergambar jelas bentuk negatif yang digunakan dalam kutipan tersebut. Hal itu ditandai dengan adanya frasa “tidak terima”. Frasa ini melambangkan ideologi **penolakan**. Melalui frasa tersebut, pembuat wacana telah membentuk citra buruk pada pedagang dan menampilkan citra yang telah dibentuk tersebut kepada publik (pembaca). Pembuat wacana memunculkan kesan kepada publik bahwa para pedagang yang digusur oleh pihak yang berwenang tersebut merupakan orang yang tidak mau diajak untuk bernegosiasi dan selalu menolak apabila digusur. Publik akan beranggapan bahwa pengusuran yang dilakukan oleh aparat terhadap para pedagang (PKL) memang sesuatu yang wajar. Konstruksi ideologi yang dilakukan oleh pembuat wacana ini akan menghilangkan rasa kasihan dan peduli publik terhadap nasib kaum tertindas, seperti PKL. Berikut ini juga ditemukan bentuk pendayagunaan fitur negatif dengan teknik yang berbeda dalam mengonstruksi ideologi.

Padahal, berniaga memang hak warga negara. Namun demikian, ada aturannya sehingga ketika hak itu dipakai tentu tidak merampas hak-hak warga lain seperti memakai badan jalan dengan nyaman dan lainnya.

Pada kutipan tersebut, terlihat adanya penggunaan frasa “tidak merampas” yang terdapat pada klausa perluasan fungsi keterangan. Klausa tersebut ditata dalam

bentuk negatif dengan tujuan untuk mengutamakan maksud kenegatifan sifat yang melekat pada agen. Dalam konteks kalimat tersebut, yang berperan sebagai agen adalah pedagang kaki lima (PKL). Jadi, maksud yang diutarakan, yakni PKL dipersilakan menggunakan haknya untuk berdagang dengan catatan tidak merampas hak orang lain. Selain itu, PKL juga dituntut untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Klausa tersebut diproduksi oleh pembuat wacana dengan menggunakan diksi yang sifatnya menyudutkan pihak PKL.

Dalam kesehariannya, tidak semua orang yang merasa risih dengan adanya PKL. Tidak sedikit juga yang merasa terbantu dengan kehadiran para PKL tersebut. Pembuat wacana terlalu berlebihan dalam mendiskreditkan PKL dengan pilihan kata yang digunakan. Ideologi yang diperjuangkan pembuat wacana dalam klausa tersebut, yakni **tidak taat aturan**. Ideologi ini dinaturalisasikan dengan menampilkan sosok PKL yang tidak patuh pada aturan dan selalu mengganggu ketertiban umum.

2. Konstruksi Ideologi Melalui Nilai Relasional dalam Rubrik Tajuk Harian Umum *Haluan Kepri*

Secara teoritis, konstruksi ideologi melalui nilai relasional ini dibagi menjadi tiga subbagian, yakni (1) melalui pendayagunaan fitur modus kalimat, (2) melalui pendayagunaan fitur modalitas, dan (3) melalui pendayagunaan fitur pronomina persona. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan berikut ini.

a. Pendayagunaan Fitur Modus Kalimat

Pendayagunaan fitur modus-modus kalimat dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni (1) kalimat deklaratif, (2) kalimat interogatif, (3) kalimat imperatif, (4) kalimat optatif, (5) kalimat obligatif, (6) kalimat desideratif, dan (7) kalimat kondisional (Chaer, 2014:258). Penjelasan pada tulisan ini hanya ditekankan pada dua jenis saja, yaitu melalui kalimat deklaratif dan interogatif. Konstruksi ideologi menggunakan kalimat yang lainnya tidak ditemukan dalam wacana yang dianalisis ini. Adapun kalimat deklaratif dan interogatif yang ditemukan, secara tidak langsung ditata oleh pembuat wacana untuk menyatakan maksud imperatif. Hal ini disebabkan karena wacana yang dianalisis bukan teks dialog, tetapi teks berjenis tajuk yang tergolong ke dalam produk jurnalistik. Berikut ini akan disajikan data konstruksi ideologi yang ditampilkan melalui kalimat deklaratif.

Dikatakannya, jika pendidikan baik, Batam akan bisa berkembang. Dengan pendidikan, Batam akan bisa maju.

Kutipan tersebut secara harfiah bernada netral. Akan tetapi, apabila ditelusuri secara pragmatik, kalimat tersebut mengandung ideologi **memerintah**. Pembuat wacana secara tidak langsung menyatakan bahwa tingkat pendidikan di Batam masih rendah. Berarti, guru yang notabenehnya adalah pelaku pendidikan tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. Dari kalimat tersebut, pembuat wacana

sepertinya mengabaikan usaha-usaha yang dilakukan oleh para guru dalam memajukan pendidikan, khususnya di Batam. Pembuat wacana seolah-olah menutup mata akan kemajuan pendidikan yang terjadi di Batam. Selain itu, dalam kutipan tersebut, terlihat pembuat wacana juga memaparkan argumentasinya berdasarkan pendapat orang lain. Hal itu ditunjukkan oleh kata “dikatakannya”. Pembuat wacana mematenkan pendapat tersebut menjadi suatu opini kepada publik sehingga si pembaca wacana seolah-olah dipaksa harus menyakini kebenaran gagasan yang disampaikannya. Selain bentuk konstruksi ideologi melalui kalimat deklaratif, berikut ini juga ditemukan melalui kalimat interogatif.

Kondisi yang paling tampak adalah berkurangnya titik macet. Sebab apa? Banyak ruas jalan yang telah mengalami pelebaran. Tidak hanya itu, titik yang sebelumnya dinilai mengganggu keindahan (estetika) kota, kini sudah mulai tertata rapi.

Dalam kutipan tersebut, konstruksi ideologi dapat dilihat dari kata tanya “apa”. Pembuat wacana menekankan kata “apa” menjadi instrumen penentu dalam menggambarkan kondisi. Dari kalimat tersebut, pembuat wacana memperjuangkan ideologi **keberhasilan**. Konteks kalimat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Batam pada

sarana infrastruktur telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Pembuat wacana menegaskan hal tersebut dalam bentuk pertanyaan retorik. Akan tetapi, maksud dan tujuannya adalah untuk membuat suatu pernyataan kepada publik. Pembuat wacana menggiring opini publik dengan menciptakan citra kinerja Pemko Batam yang baik. Pihak yang diuntungkan, dalam hal ini Pemko Batam, berada pada posisi superior. Secara implisit, publik diwajibkan untuk mempercayai dengan yang digambarkan oleh pembuat wacana.

Hal yang berbeda ditunjukkan dalam kutipan berikut. Pembuat wacana masih menggunakan modus kalimat interogatif dalam mengonstruksi ideologi. Akan tetapi, ideologi yang ditampilkan terlihat memarginalkan kelompok tertentu. Kutipan berikut berasal dari teks yang berbeda.

*Bahkan, di satu sisi, bukan tidak mungkin, sebagian murid yang orang tuanya punya kemampuan lebih, bisa lebih "maju" dari guru mereka di sekolah. **Ini karena apa?** Di rumah, orang tua dapat memenuhi segala "perkembangan dunia" dengan finansial yang dimiliki. Namun, bagi guru dengan serba keterbatasan, jelas akan tertinggal.*

Kutipan tersebut membuktikan adanya nilai-nilai relasional yang diberdayakan melalui modus kalimat deklaratif. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata tanya "apa" dalam bentuk

pertanyaan retorik. Pembuat wacana berusaha membentuk hubungan relasi dengan publik (guru sebagai pembaca). Dalam kalimat tersebut, pembuat wacana membandingkan secara finansial antara orang tua siswa dengan guru. Pembuat wacana terlihat memarginalkan posisi guru secara finansial dengan mengonstruksi ideologi **profesi yang tidak menguntungkan**. Ideologi ini dinaturalisasikan melalui kalimat deklaratif yang dimunculkan setelah kalimat interogatif tersebut. Maksud yang implisit yang terkandung dalam kalimat ini, yakni secara emosional guru tidak sejahtera karena faktor finansial yang kurang. Hal inilah yang menyebabkan guru selalu tertinggal sehingga tidak maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Dapat disimpulkan bahwa pembuat wacana ingin memperlihatkan kepada publik bahwa profesi guru merupakan pekerjaan yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Guru merupakan profesi dengan tingkat penghasilan yang rendah dan hidup dalam serba keterbatasan. Ideologi ini seolah-olah seperti *common sense* yang diterima oleh publik.

b. Pendayagunaan Fitur Modalitas

Konstruksi ideologi melalui nilai relasional dapat juga dilakukan melalui pendayagunaan sejumlah modalitas, menurut (Alwi dalam Santoso, 2002:139) di antaranya (1) modalitas intensional, (2) modalitas epistemik, (3) modalitas deontik, dan (4) modalitas dinamik. Dalam tulisan ini, data yang ditemukan hanya pada modalitas intensional, epistemik, dan

deontik. Oleh karena itu, pembahasan hanya difokuskan pada ketiga bentuk modalitas tersebut. Berikut ini disajikan data dalam bentuk penggunaan modalitas intensional.

*Pemerintah Kota Batam dan seluruh stakeholder tengah **berupaya keras** untuk menciptakan kenyamanan dan kondusifitas yang baik.*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa adanya penggunaan modalitas “berupaya keras”. Modalitas ini memonjolkan sesuatu yang sebenarnya tidak aktual menjadi terlihat aktual. Selain itu, dalam kalimat ini, penggunaan modalitas “berupaya keras” mengakibatkan posisi agen menjadi lebih kuat. Pemerintah Kota Batam seolah-olah terlihat memang bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai institusi yang berwenang. Selain itu, kalimat ini juga menciptakan opini publik bahwa Pemko Batam terlihat benar-benar menampung aspirasi masyarakat Kota Batam. Dalam hal ini, pembuat wacana berusaha memperjuangkan ideologi **sosok pekerja keras**. Ideologi ini dinaturalisasikan dalam bentuk modalitas intensional ini. Selain penggunaan modalitas intensional, dalam data ini juga ditemukan konstruksi ideologi melalui penggunaan modalitas epistemik. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

*Usaha untuk menjadikan seluruh kawasan di Batam bebas dari genangan air saat hujan, **dinilai** bukan*

masuk dalam program singkat.

Dari kutipan tersebut, dapat diketahui adanya penggunaan kosakata “dinilai” yang merupakan modalitas epistemik. Ideologi yang terkandung dalam kata ini ditunjukkan melalui nilai relasional. Kata “dinilai” merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak diyakini kebenaran dan kepastiannya oleh pembuat wacana. Selain itu, pembuat wacana menyembunyikan keragu-raguannya tersebut melalui kata “dinilai”. Jadi, melalui penggunaan modalitas epistemik ini, pembuat wacana terlihat sedang mengonstruksi ideologi **kepastian** dan **keyakinan**. Pembuat wacana mencoba meyakinkan publik dengan sedikit pengetahuannya tentang program penanggulangan genangan air hujan yang dilakukan oleh Pemko Batam. Selain penggunaan modalitas epistemik, berikut ini juga ditemukan penggunaan modalitas deontik dalam mengonstruksi ideologi.

*Solusinya pun sudah jelas, pedagang yang berjualan di daerah terlarang **harus** pindah.*

Pada kutipan tersebut, terlihat modalitas dalam nilai relasional yang ditandai dengan kata “harus”. Dalam kalimat itu, pembuat wacana secara implisit memarginalkan para pedagang. Pembuat wacana berargumen dengan memanfaatkan kaidah sosial untuk mengemukakan gagasannya. Pembuat wacana berpijak pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk penertiban para pedagang (PKL).

Nilai relasional yang dimunculkan dalam kutipan ini, yakni pembuat wacana mencoba menyadarkan para pedagang untuk mengikuti aturan yang ada tanpa melihat kondisi yang nyata di lapangan. Pembuat wacana berada pada posisi yang pro pemerintah. Oleh sebab itu, ideologi yang dikonstruksi dalam hal ini adalah ideologi **keharusan**. Pembuat wacana secara tidak langsung mengemukakan bahwa aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak boleh dilanggar. Semua pedagang harus tunduk pada ketentuan hukum. Akan tetapi, pembuat wacana seolah menutup mata bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah itu, khususnya Pemko Batam, ada unsur politisnya. Pembuat wacana menciptakan relasi yang membuat publik harus memercayai apa yang diucapkannya itu benar.

c. Pendayagunaan Fitur Pronomina Persona

Pronomina personal ini berkaitan dengan kehadiran diri si penutur/penulis untuk memposisikan kehadiran dirinya terhadap mitra bicara/pembaca. Strategi kehadiran diri ini direpresentasikan dalam bentuk pronomina persona pertama tunggal maupun jamak. Menurut Santoso (2003:60) bahwa penggunaan pronomina persona pertama ini sangat erat kaitannya dengan hubungan kekuatan, kekuasaan, ataupun solidaritas. Penutur/penulis cenderung dalam bahasa cenderung menggunakan kosakata tertentu untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaannya. Berikut contoh-contoh kutipan data yang menggunakan persona pertama dalam konstruksi ideologinya.

Kita sering menyaksikan baik di televisi maupun baca di koran menggambarkan bagaimana perlawanan para pedagang terhadap penggusuran tersebut.

Dalam kutipan tersebut, terlihat adanya kata “kita” yang merupakan pronomina persona. Pembuat wacana menghadirkan dirinya dalam teks sebagai orang pertama jamak. Pembuat wacana mencoba membangun relasi dengan publik bahwa yang menyaksikan perlawanan pedagang terhadap penggusuran di berbagai media tersebut tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain (dalam hal ini, para pembaca, termasuk juga pedagang itu sendiri). Pembuat wacana mengajak pembaca untuk menyaksikan fenomena perlawanan yang dilakukan oleh pedagang terhadap aparat yang melakukan penggusuran. Oleh karena itu, gagasan yang disampaikan lebih bersifat meyakinkan. Konstruksi ideologi yang dilakukan oleh pembuat wacana, yakni ideologi **keburukan mental pedagang**. Pembuat wacana selalu menekankan kata-kata “perlawanan” dalam teks ini. Kata perlawanan dinaturalisasikan sedemikian rupa sehingga para pedagang (PKL) memang identik dengan orang yang sering melawan. Hal ini terlihat secara nyata bagaimana proses pemarginalan terhadap para pedagang, khususnya pedagang kaki lima.

3. Konstruksi Ideologi Melalui Nilai Ekspresif dalam Rubrik Tajuk Harian Umum *Haluan Kepri*

Secara teoritis, unsur gramatikal yang memuat nilai ekspresif ditandai dengan adanya penggunaan modalitas ekspresif yang dinyatakan (Fairclough, 1989; Santoso, 2012). Ada beberapa modalitas ekspresif yang mengandung nilai ekspresi yang ditemukan dalam teks yang dianalisis. Akan tetapi, dalam tulisan ini hanya disajikan beberapa saja karena konstruksi ideologi melalui nilai-nilai ekspresif yang terjadi dalam teks-teks yang dianalisis ini secara teknis sama walaupun menggunakan modalitas yang berbeda. Adapun contoh kutipan yang mengandung nilai ekspresif dapat dilihat berikut ini.

Betapa tak berdayanya pedagang karena dari kaca mata hukum memang lemah.

Kutipan tersebut memuat nilai ekspresif yang ditunjukkan oleh modalitas “betapa”. Pembuat wacana mencoba merepresentasikan kelemahan para pedagang (PKL) di mata hukum. PKL adalah orang yang cacat hukum dan harus ditindas. Melalui nilai ekspresif ini, pembuat wacana memarginalkan para pedagang dalam teksnya. Konstruksi Ideologi dihasilkan oleh pembuat wacana, yakni ideologi **kelemahan**. Para pedagang, seperti PKL, merupakan masyarakat kelas bawah dengan tingkat penghasilan yang rendah. Mereka berjualan hanya sekadar untuk menyambung kehidupan dari hari ke hari. Seharusnya,

pemerintah menempatkan perhatian khusus kepada para pedagang kelas bawah ini. Akan tetapi, pembuat wacana menyoroti dari sudut pandang yang berbeda. Pembuat wacana menaturalisasikan kata “kelemahan” menjadi sesuatu yang wajar diterima oleh publik. Selain itu, bentuk nilai ekspresi pengonstruksi ideologi juga diperlihatkan dalam kutipan berikut.

*Melihat perkembangan dunia saat sekarang, **tidak ada kata lain**, jika tenaga pendidik pun harus dapat mengikuti kemajuan yang terjadi. Kalau hanya mengandalkan ilmu dan pengetahuan yang ada, rasanya sangat mustahil anak didik dapat berkembang.*

Nilai ekspresif yang terkandung pada kutipan tersebut ditunjukkan oleh modalitas ekspresif berupa frasa “tidak ada kata lain”. Ideologi yang sedang dikonstruksi oleh pembuat wacana adalah ideologi **keharusan**. Melalui teks tersebut, pembuat wacana menyatakan bahwa guru masih ketinggalan dan tidak mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Secara tidak langsung, pembuat wacana membentuk opini kepada publik bahwa guru adalah orang yang malas dan tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, melalui nilai ekspresif ini secara implisit juga tersirat bahwa guru cenderung menjalankan profesinya dengan apa adanya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada beberapa data tersebut,

terlihat adanya konstruksi ideologi melalui bahasa yang digunakan oleh para pembuat wacana. Hal ini menurut Santoso (2012:137) karena adanya maksud dan tujuan tertentu, yakni (1) mensistematisasi, mentransformasi, dan mengubah realitas, (2) mengatur ide serta tingkah laku orang lain, (3) mengklasifikasikan publik, peristiwa, serta objek dalam hal penegasan status personal atau institusional. Hal inilah yang digambarkan dalam rubrik tajuk pada harian umum *Haluan Kepri* yang dinalisis ini. Pembuat wacana (penulis tajuk) mengatur beberapa ide yang ingin disampaikan dalam bentuk representasi gramatikal. Konstruksi ideologi tersebut ditata sedemikian rupa melalui fitur-fitur yang terdapat dalam kalimat. Mengacu kepada pendapat Badara (2013:29) bahwa analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat.

D. SIMPULAN

Kajian wacana kritis yang dilakukan ini masih terbatas hanya pada bagian deskripsi teks saja dan belum menyentuh pada tahapan interpretasi maupun eksplanasi. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada tahapan deskripsi tersebut dapat diketahui bahwa pembuat wacana mengonstruksi ideologinya melalui penggunaan fitur-fitur yang terdapat dalam gramatikal teks yang dianalisis. Konstruksi ideologi yang dibangun terlihat memarginalkan kelompok-kelompok tertentu. Pembuat wacana, yang notabene adalah pemimpin redaksi harian umum

Haluan Kepri, menaturalisasikan ide-idenya sehingga menjadi sebuah *common sense*. Teori-teori yang dikemukakan oleh Norman Fairclough memang terealisasi dalam praktik wacana di media massa ini. Dapat dikatakan bahwa hasil kajian tentang wacana kritis ini mengokohkan teori Norman Fairclough.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Rangga. (2016). "Strategi Kebahasaan Presiden Jokowi dalam Menanamkan Ideologi dan Manifesto Pemerintahan". *Litera* (Volume 15, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 379—388).
- Chaer, Abdul. (2014). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badara, Aris. (2013). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Butt, D., Fahey, R., Spinks, S., & Yallop, C. (1995). *Using Functional Grammar: An Explorer's Guide*. Sydney: Macquary University.
- Fairclough, Norman. (1989). *Language and Power*. London and New York: Longman Group UK Limited.
- Firman. (2015). "Konstruksi Ideologi dalam Wacana Keagamaan Jaringan Islam Liberal" (Disertasi tidak Dipublikasikan). Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Fowler, Roger. (1996). *Linguistic Criticism*. London: Oxford University Press.
- Halliday, M.A.K. (2004). *An Introduction to Functional Grammar* (Third Edition, Rev. Christian M.I.M. Matthiessen). London: Hodder Arnold.

- Mujiyanto. (2016). “Pendayagunaan Fitur Lingual dalam Wacana Agraria di Media Massa” (Disertasi tidak Diterbitkan). Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Nurhayati. (2014). “Representasi Peristiwa dalam Media: Pemberitaan Peristiwa Banjir dalam *Suara Merdeka*”. *Parole* (Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 32—54).
- Santoso, Anang. (2002). “Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Wacana Politik” (Disertasi dipublikasikan). Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Santoso, Anang. (2003). *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Santoso, Anang. (2012). *Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Yuliarni. (2013). “Pro dan Kontra dalam Pembentukan RUU Anti Pornografi dan Pronoaksi dalam Artikel Majalah Al-Wa’ei: Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough”. *Parole* (Volume 3, Nomor 1, April 2013, hlm. 9—20).